

Judul : Dilaporkan ICW ke MKD karena Minta Difasilitasi KJRI New York: Fadli Berkelit dengan Sumber Waras
Tanggal : Jumat, 01 Juli 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Dilaporkan ICW Ke MKD Karena Minta Difasilitasi KJRI New York

Fadli Berkelit Dengan Sumber Waras

Wakil Ketua DPR Fadli memang pandai berkelit. Saat beberapa LSM melaporkan dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas permintaan fasilitas ke KJRI New York, dia langsung membelokkan isu ke kasus lain. Fadli justru meminta LSM itu menyoroti kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta.

LSM yang melaporkan Fadli ini menamakan diri Koalisi Anti Katebece DPR. Mereka terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Centre (IBC), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Kemarin, mereka mendatangi MKD untuk melaporkan Fadli dan Rachel Maryam.

“Dua-duanya diduga melanggar Tata Tertib DPR Pasal 6 ayat

4 yang menyebutkan larangan bagi anggota DPR menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi, baik untuk dirinya ataupun keluarganya,” ucap aktivis ICW, Donal Fariz di Gedung DPR, kemarin.

Fadli dilaporkan karena ada surat permintaan ke KJRI New York untuk memfasilitasi anaknya yang tengah berkunjung ke Amerika. Sedangkan

Rachel dilaporkan karena meminta Kedubes Prancis memfasilitasi dirinya yang tengah liburan di sana. “Fadli memang sudah mengklarifikasi, kami hormati. Tapi, klarifikasi penting untuk dibuktikan dan diuji ke MKD agar tidak menimbulkan polemik,” terang Donal.

Dalam laporan itu, ICW es membawa bukti berupa surat untuk Kedubes AS yang ditandatangani pihak Setjen DPR untuk Fadli Zon, surat Rachel Maryam untuk Kedubes Prancis, dan bukti berita faksimili. ICW juga melampirkan akta organisasi untuk *legal standing*.

Ketua MKD Surahman Hidayat menyatakan, sebelum

menindaklanjuti aduan tersebut, pihaknya akan melakukan verifikasi. “Tentu diverifikasi dulu legal standing dan substansi yang diajukan,” terangnya.

Anggota MKD Syarifudin Sudding menyatakan hal serupa. Pihaknya akan menerima laporan tersebut. Tapi, untuk ditindaklanjuti atau tidak, tergantung hasil verifikasi. “Setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan anggota DPR ke MKD. Kami menerima siapapun, tapi tidak mungkin setiap laporan serta merta ditindaklanjuti. Harus ada verifikasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Verifikasi ini akan memakan waktu antara satu sampai dua

minggu. Hal yang diverifikasi bukan sekadar administrasi, tapi mencari bukti kuat anggota DPR yang dilaporkan benar atau tidak telah melakukan hal yang dituduhkan.

Fadli keukeuh mengklaim tidak salah atas permintaan ke KJRI itu. Dia beralasan, tidak pernah menulis surat atau memerintahkan pihak Setjen DPR membuat surat agar KJRI memfasilitasi anaknya yang sedang berada di New York.

“Masalah ini kan sudah *clear*, sudah jelas. Saya tidak melanggar konstitusi apapun, tidak melanggar undang-undang, tata tertib, dan tidak pernah menulis surat,” jelasnya di Gedung DPR, kemarin.

Bagi Fadli, pelaporan itu malah memperlihatkan ICW cs mengurus hal-hal kurang penting. Padahal, banyak kasus besar seperti dugaan korupsi RS Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta yang perlu sikap kritis ICW.

“ICW kan *corrupt watch*, lebih baik *concern* (mengawasi korupsi). Saya tidak melakukan korupsi atau merugikan negara. Ada kerugian negara yang besar, itulah seharusnya yang jadi pusat perhatian kawan-kawan LSM. Jadi kawan-kawan ICW saya sarankan masalah Sumber Waras, reklamasi ada ratusan miliar rupiah. Kalau ini, nggak ada apa-apanya,” cetusnya.

Pihak Setjen DPR justru meminta maaf ke Fadli. Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen Setjen DPR Saiful Islam mengaku, dalam penulisan surat bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/2016 terdapat salah teknis. Kesalahan yang dimaksud adalah ada kata pendampingan untuk Shafa Sabila Fadli, putri Fadli Zon, selama di New York dari 12 Juni hingga 12 Juli 2016.

“Atas kekeliruan surat tersebut, Kepala Biro Kerja sama Antar Parlemen menyampaikan permintaan maaf, khususnya kepada Bapak Fadli Zon dan Shafa Sabila Fadli atas ketidaknyaman dengan pemberitaan yang berkembang,” ujarnya. ■ QAR